



Pendampingan untuk Korban

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Little Aresha Daycare hingga tuntas. Selepas menemui sejumlah orang tua korban di rumah dinasny, Minggu (26/4), Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan pihaknya berada di sisi orang tua korban untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Pemkot mendorong proses hukum tidak tebang pilih terhadap siapapun yang bertanggung jawab, terlepas dari sosok-sosok di balik yayasan tersebut. "Masyarakat kami, anak-anak kami mendapatkan perlakuan yang tidak pas. Saya kira kita harus menegakkan keadilan seadil-adilnya," tegasnya.

Guna mendampingi orang tua yang merasa dirugikan, pemkot melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bersama KPAL telah membentuk tim khusus. Tim ini juga diperkuat oleh konsultan hukum untuk menampung dan mencatat seluruh laporan dari para orang tua korban sebagai bahan masukan bagi proses hukum di kepolisian. "Catatan-catatan ini saya kira menjadi bahan masukan proses hukum selanjutnya. Harapan keluarga tadi, mereka merasa ditipu dan ingin diberikan pasal berlapis. Hal-hal seperti itu kita hormati dan kita rekam," tambahny.

Menanggapi rumor yang beredar di masyarakat mengenai keterlibatan figur-figur tertentu sebagai pemilik yayasan, Hasto mengaku belum menerima data

hitam di atas putih. Namun, mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI tersebut memastikan proses audit sedang berjalan. "Kalau data tertulis saya sendiri belum baca, tapi pengurus yayasan sudah ada datanya di dinas. Kita audit untuk melihat realitas antara dokumen dengan data di lapangan," jelasnya. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kapolresta Yogyakarta untuk menyinkronkan data struktur organisasi yang ada dalam barang bukti kepolisian, untuk memastikan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum.

Terkait status Little Aresha Daycare yang kini telah dipasang garis polisi, Hasto menyebut jika sebuah lembaga pendidikan atau pengasuhan beroperasi tanpa izin, maka tindakan tegas berupa penutupan permanen adalah harga mati. "Kalau operasional pendidikan tanpa izin, itu jelas ilegal. Begitu ketahuan tidak berizin, ya, mestinya sudah tidak boleh operasional dan harus segera ditutup," urainya.

Pemkot Yogya pun siap mencari *daycare* pengganti untuk para korban Little Aresha. Hasto tidak ingin para orang tua yang sebagian merupakan pekerja, terjepit dalam kebingungan saat memasuki hari kerja di hari Senin (27/4) ini. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan dinas terkait, bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diminta untuk segera memetakan tempat penitipan anak alternatif.

Tak hanya mencari solusi jangka pendek, pemkot juga melakukan tindakan preventif be-

sar-besaran supaya insiden serupa tidak terulang kembali. Hasto memerintahkan jajarannya untuk melakukan *sweeping* atau pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh *daycare* yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta. "Hari ini (kemarin) sudah masuk data semua *daycare* yang ada di Kota Yogyakarta, kemudian kita akan cek satu persatu besok pagi (hari ini). Saya kira dalam waktu singkat, paling lama dua hari kita sudah tahu semua status *daycare* yang ada," tegas mantan Bupati Kulon Progo itu.

Tambah tersangka?

Polda DIY memastikan 13 tersangka kasus dugaan kekerasan terhadap anak di *daycare* Little Aresha langsung ditahan. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan mengatakan, masih ada kemungkinan penambahan tersangka. Namun, hal itu tergantung pada proses pengembangan penyidikan ke depan, termasuk kemungkinan penambahan keterangan dari tersangka yang kini sudah ditahan.

Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susihaningtias menyatakan, pihaknya tengah menjalin koordinasi intensif dengan sejumlah instansi terkait di Yogyakarta, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY.

Mengingat korban merupakan anak-anak di bawah umur, LPSK memastikan bahwa bentuk perlindungan akan disesuaikan dengan kerentanan dan kebutuhan masing-masing, baik bagi korban maupun orang tuanya. (**aka/maw/han**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005